

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agung Djojosoekarto dkk, *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2004.
- Agus Yuliandi dkk, *Bikameral bukan federal*, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta, 2006.
- Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005.
- Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran, Yogyakarta, 2007.
- Benny Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman*, Elsam, Jakarta, 2003.
- Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Fatmawati, *Hukum Tata Negara*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014.
- Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003.
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- , *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004.
- K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Edisi Dua, Pustaka Eureka, Surabaya, 2005.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Ctk Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2000*, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Edisi

Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

— ~~*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2000*~~, Buku III Lembaga Permusyawaratan Perwakilan, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

— ~~*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2000*~~, Buku III Lembaga Permusyawaratan Perwakilan, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2016.

Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

PuteraAstomo, *Hukum Tata Negara TeoridanPraktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Pukap, Makassar, 2008.

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Suwarma, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.

Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

B. Jurnal Hukum

Yuriska, *Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum*, No 2, Vol 2 2010.

Hernadi Affandi, *Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, No 1, Vol 1 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

The Constitutions United of America

